



Demokrasikita.id sebagai Bagian dari *Civil Society* dalam Penguatan Demokrasi Lokal di Kota Bandung

Syaira Diasyifa Herlambang ^{1*}, Muhammad Alfian Zuhri ², Muradi ³

¹⁻³ Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad, Indonesia

Email: syaira23001@mail.unpad.ac.id¹, muhammad23168@mail.unpad.ac.id², muradi@unpad.ac.id³

*Penulis Korespondensi: syaira23001@mail.unpad.ac.id

Abstract. Demokrasikita.id was established as a civil society initiative aimed at enhancing the quality of local democracy, particularly in anticipation of the Bandung City Regional Election. The emergence of demokrasikita.id is a form of criticism of the tendency of participants in the local political process, where the political agenda is often dominated by party elites and certain interests. This study uses a qualitative approach with analysis based on civil society theory. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation studies. The results of the study show that the role of demokrasikita.id in strengthening local democracy as a civil society covers two aspects, namely advocacy through a series of systematic stages, starting from issues to participatory forums and social control, which is realized through five aspirations resulting from the participatory process of the Bandung City Community. Meanwhile, the role of empowerment is not the focus of demokrasikita.id but is still present to complement it. In its efforts to become a forum for civil society movements, demokrasikita.id is often faced with internal and external challenges, such as the commitment of its activists to maintaining the stability and direction of the organization and how it navigates local political and social conditions that do not yet fully support the growth of deliberative public participation.

Keywords: Civil Society, Local Democracy, Political Participation, Public Participation, Social Control.

Abstrak. Demokrasikita.id lahir menjadi bagian dari civil society sebagai salah satu inisiatif masyarakat sipil yang berfokus pada penguatan kualitas demokrasi lokal, khususnya menjelang momentum Pilkada Kota Bandung. Kemunculan demokrasikita.id menjadi bentuk kritik terhadap kecenderungan partisipan dalam proses politik lokal, di mana agenda politik sering kali di dominasi oleh elit partai dan kepentingan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis menggunakan teori civil society. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran demokrasikita.id dalam penguatan demokrasi lokal sebagai civil society mencakup dua aspek yaitu advokasi melalui serangkaian tahapan sistematis, mulai dari isu hingga forum partisipatif dan kontrol sosial yang diwujudkan melalui lima aspirasi hasil proses partisipatif Masyarakat Kota Bandung. Sementara itu, peran pemberdayaan tidak menjadi fokus dalam demokrasikita.id namun tetap hadir untuk melengkapi. Dalam usaha menjadi wadah bagi gerakan masyarakat sipil membuat demokrasikita.id seringkali dihadapkan dengan faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi tantangan seperti komitmen dari para penggerak dalam menjaga stabilitas dan arah gerak organisasi serta bagaimana organisasi menavigasi kondisi politik dan sosial di tingkat lokal yang belum sepenuhnya mendukung tumbuhnya ruang partisipasi publik yang deliberatif.

Kata kunci: Civil Society, Demokrasi Lokal, Kontrol Sosial, Partisipasi Politik, Partisipasi Publik.

1. LATAR BELAKANG

Demokrasi merupakan tatanan hidup bernegara yang dipilih negara di dunia pada umumnya. Masyarakat Indonesia mempercayai bahwa sistem pemerintahan demokrasi sebagai sistem terbaik dengan kategori evaluasi yang mencakup kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan berkumpul, penegakan hukum, kebebasan media massa, dan pemilihan umum. Namun, demokrasi yang ada di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan besar dan dinilai mengalami kemunduran.

Secara sederhana demokrasi dapat dipahami sebagai suatu mekanisme pengambilan keputusan yang di dalamnya terdapat persamaan hak setiap anggota kelompok atau asosiasi (Hadiwinata 2005). Civil society dianggap penting dalam kehidupan demokrasi. Lebih jauh, Beetham menekankan bahwa associational life atau civil society merupakan bagian yang penting dalam demokrasi. Keberadaan civil society berfungsi untuk menyeimbangkan kekuasaan negara dan memberikan perlindungan bagi individu dari dominasi kekuasaan negara. Civil society memiliki peran penting dalam mendorong advokasi, melakukan pemberdayaan, sekaligus menjalankan fungsi kontrol terhadap praktik kekuasaan.

Gagasan mengenai civil society telah lama berkembang di Indonesia. Pada awalnya gagasan ini berangkat dari upaya mengidentifikasi berbagai hak masyarakat yang dirampas, kemudian menumbuhkan kesadaran bahwa hak-hak tersebut harus dikembalikan. Ketika negara terlalu dominan dan sektor swasta menguasai ruang-ruang strategis, sementara masyarakat berada dalam posisi lemah, akan terjadi stagnasi dan ketergantungan masyarakat terhadap mekanisme pasar. Berdasarkan hal tersebut, tujuan utama civil society adalah menciptakan tatanan sosial di mana tidak ada dominasi negara maupun kelompok kuat terhadap kelompok lemah (Usman 2002). Ketika negara semakin meminimalisir perannya, muncul kekuatan civil society mengambil alih sebagian fungsi yang seharusnya dijalankan oleh negara. Kondisi tersebut seharusnya bukan menjadi sebuah persoalan, sebab sebagaimana yang dikemukakan oleh United Nations Development Programme (UNDP), konsep good governance justru menekankan adanya sinergi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial. Sinergi ini melibatkan sektor negara dan sektor non-negara secara bersama-sama dalam mengelola urusan kolektif masyarakat.

Gerakan masyarakat sipil tumbuh sejak masa Orde Baru sebagai respon kontradiktif terhadap otoritarianisme dan dominasi negara. Gerakan ini dasarnya merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap mengekang masyarakat. Ketika masyarakat berhasil keluar dari kontrol negara dan mampu berdiri lebih mandiri, maka peluang menuju demokratisasi akan semakin terbuka. Runtuhnya Orde Baru menjadi titik balik bagi perkembangan civil society di Indonesia, karena melahirkan harapan baru akan adanya kekuatan penting yang mampu mendorong lahirnya gerakan baru politik di Indonesia. Situasi tersebut semakin diperkuat dengan struktur politik yang lebih terbuka melalui berbagai kanal, termasuk negosiasi dan lobi politik yang sebelumnya dianggap tabu.

Perkembangan civil society semakin terlihat dengan lahirnya berbagai organisasi non-pemerintah, komunitas, kelompok advokasi, hingga media alternatif. Kehadiran mereka menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat akan ruang partisipasi yang lebih luas, terutama

dalam menghadapi dinamika politik yang seringkali kurang responsif terhadap kepentingan publik. Fenomena ini juga tercermin dalam konteks lokal, khususnya di Kota Bandung.

Kota Bandung memiliki pertumbuhan komunitas masyarakat sipil cukup pesat. Berbagai gerakan dan komunitas warga bermunculan dengan fokus pada berbagai isu mulai dari isu lingkungan, seni budaya, literasi, hingga politik demokrasi. Kehadiran ini menandakan bahwa demokrasi ditingkat lokal memperoleh dukungan nyata dari aktor-aktor non-pemerintah yang berusaha mengisi ruang partisipasi masyarakat. Salah satu aktor yang menjadi perhatian adalah demokrasikita.id, sebuah Non-Governmental Organization (NGO) sekaligus media alternatif yang lahir dari kegelisahan atas minimnya ruang dialog, keterbatasan akses terhadap informasi kritis bagi masyarakat, dan minimnya esensi demokrasi dalam pemilihan umum kepala daerah Kota Bandung. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Bandung menjadi momentum demokrasikita.id untuk melakukan penjaringan aspirasi masyarakat yang dipetakan menjadi sebuah isu Kota Bandung yang harus dikawal, sehingga setiap suara masyarakat tidak hanya berhenti pada bilik suara. Eksistensi demokrasikita.id bukan hanya sebagai ruang alternatif partisipasi masyarakat, tetapi sebagai bentuk kritik terhadap partai politik yang tidak menjalankan fungsi pemetaan aspirasi masyarakat sesuai realita di Kota Bandung.

Kondisi tersebut menjadi dasar untuk mengkaji sejauh mana demokrasikita.id berkontribusi terhadap penguatan demokrasi lokal di Kota Bandung. Maka dari itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul "DemokrasiKita.id sebagai Bagian dari Civil Society dalam Penguatan Demokrasi Lokal di Kota Bandung".

2. KAJIAN TEORITIS

Civil Society

Civil society atau masyarakat sipil merupakan konsep yang banyak dibahas dalam ranah ilmu sosial, terutama dalam kaitannya dengan relasi antara negara dan masyarakat. Secara historis, konsep ini muncul di Eropa pada masa pencerahan melalui pemikiran tokoh-tokoh seperti John Locke, Montesquieu, dan Hobbes. Namun, dalam tradisi sosial liberal, pembahasan tentang civil society banyak mengacu pada pandangan Alexis de Tocqueville yang menempatkan masyarakat sipil sebagai kelompok penyeimbang kekuasaan negara. Menurut Tocqueville, masyarakat sipil adalah entitas yang melampaui batas kelas sosial, memiliki kapasitas politik tinggi, dan berfungsi sebagai kekuatan kontrol terhadap kecenderungan intervensi negara.

Larry Diamond mengemukakan pendapatnya mengenai civil society, di mana ia menempatkan masyarakat sipil berada di antara wilayah pribadi dan negara, yang mencakup

organisasi formal maupun informal dalam bidang pendidikan, ekonomi, budaya, dan informasi. Menurut Diamond, civil society memiliki sembilan ciri utama, antara lain kemandirian, toleransi, partisipasi aktif dalam kebijakan publik, keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Diamond 1999). Selain itu, terdapat lima karakteristik yang membedakan civil society dari organisasi masyarakat lainnya, yaitu berfokus pada kepentingan publik, tidak berafiliasi langsung dengan negara, bersifat pluralisme, tidak mewakili seluruh kepentingan komunitas tertentu, serta berbeda dari organisasi yang tertutup dan eksklusif (Paradise, M. A., & Lubis 2025). Dengan demikian, organisasi yang intoleran, tertutup, atau hanya memperjuangkan kepentingan pribadi tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari civil society. Bagi Diamond, civil society terbentuk melalui partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai organisasi, koalisi, maupun serikat yang memungkinkan warga berbagi pengalaman, memperjuangkan cita-cita bersama, serta memperkuat nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan publik.

Sementara itu, dalam konteks Indonesia, konsep civil society mengalami proses adaptasi yang unik. Muhammad A.S. Hikam melalui karyanya Demokrasi dan Civil Society menjelaskan bahwa istilah “masyarakat sipil” atau “masyarakat madani” belum sepenuhnya mampu merepresentasikan kompleksitas makna civil society karena perbedaan konteks sosial dan politik antara Barat dan Indonesia (Hikam 1999). Hikam memaknai civil society sebagai ruang tempat warga negara berinteraksi secara bebas dan setara di ruang publik, di luar dominasi negara maupun partai politik. Dalam ruang tersebut, warga memiliki otonomi untuk menyalurkan aspirasi, membangun kesadaran politik, serta memperjuangkan kepentingan bersama. Dengan demikian, civil society berperan penting dalam pembentukan politik kewargaan serta menjadi fondasi bagi proses demokratisasi, termasuk pada level lokal.

Jika dikaitkan dengan konteks fungsionalnya, Chazan dalam (Hadiwinata 2005) menegaskan bahwa hadirnya civil society dalam demokrasi di sebuah negara sebagai kelompok yang memiliki fungsi untuk membatasi kekuasaan negara, menjadi perantara yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat kepada negara, serta sebagai jaringan sosial yang dapat menekan dan menyeimbangkan pemerintahan. Pandangan yang dikemukakan oleh Chazan ini dapat memperluas pemahaman bahwa fungsi civil society tidak hanya sebatas ruang partisipatif masyarakat, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang memiliki fungsi mengoreksi dan menjembatani terhadap kekuasaan negara. Hadirnya civil society menjadi sebuah hal yang penting agar dapat menjaga keseimbangan antara negara dan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap praktik demokrasi dijalankan sesuai dengan prinsipnya.

Civil Society Organization (CSO)

Hadirnya civil society sebagai salah satu dari pilar demokrasi memberikan upaya alternatif dalam rangka pembangunan partisipatif dalam kalangan masyarakat sipil dan pemberdayaan masyarakat. Dalam mendefinisikan secara sederhana mengenai civil society organization (CSO) kita dapat menyebutnya sebagai suatu organisasi yang berada di luar sektor negara, mencakup organisasi kecil hingga berbasis pada keanggotaan yang lebih luas dan terstruktur. Jika merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh United Nations Development Program (UNDP), CSO merujuk pada segala organisasi non-market dan non pemerintah selain keluarga dimana masyarakat mengorganisasikan diri mereka sendiri untuk mencapai kepentingan bersama di ranah publik. Definisi ini menegaskan bahwa CSO memainkan peran penting dalam memperkuat partisipasi warga negara, mendorong akuntabilitas pemerintahan, serta membangun ruang publik yang memungkinkan warga berperan aktif dalam proses demokratisasi, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh UNDP, keberadaan CSO merupakan representasi dari masyarakat sipil dalam kehidupan demokratis. CSO menjadi organisasi yang memberikan wadah antara masyarakat dengan negara dalam mewujudkan nilai-nilai partisipasi, independensi, dan solidaritas. (Yanti 2025) menjelaskan bahwa untuk melaksanakan perannya secara efektif, masyarakat sipil membentuk suatu lembaga yang dikenal dengan istilah civil society organization (CSO). Lembaga ini dibentuk oleh masyarakat secara mandiri, bebas dari intervensi pemerintah, serta tidak berorientasi pada keuntungan ekonomi sebagaimana sektor swasta . Pada hakikatnya, CSO memiliki beberapa tujuan utama, yaitu mengartikulasikan isu-isu publik yang berkembang di masyarakat, mengidentifikasi permasalahan sosial yang dihadapi warga, memberdayakan masyarakat melalui pelaksanaan program kelompok, serta menjadi wadah aspirasi yang independen dalam memperjuangkan kepentingan publik. Dengan demikian, keberadaan CSO tidak hanya memperkuat posisi masyarakat sipil dalam relasinya dengan negara, tetapi juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi baik mengenai isu politik, ekonomi, dan sosial secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Dalam konteks demokrasi di Indonesia, (Sihite, G. M., Malik, I., KY, I. G. S., & Widodo 2023) melihat bahwa peran dari CSO berkembang dengan dinamika yang lebih kompleks. Menurutnya CSO dibagi menjadi dua lapisan, yaitu grassroots activists atau aktivis akar rumput yang berperan mendorong namun sekaligus membatasi proses demokratisasi dari bawah dan kelompok intermediary cause-oriented yang berfokus kepada isu tematik dan menjadi penghubung antara masyarakat dengan pembuat kebijakan. Pandangan ini menunjukkan bahwa

keberadaan CSO memiliki fungsi ganda. Disatu sisi sebagai kekuatan sosial yang mampu untuk mengontrol negara, dan disisi lain sebagai penyeimpang pemerintahan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandung. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, penelitian ini dilakukan berupaya untuk menjelaskan peran demokrasikita.id sebagai bagian dari civil society dalam penguatan demokrasi lokal di Kota Bandung. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara merupakan salah satu cara yang sering dipakai dalam mengumpulkan data riset kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan macam-macam data dari responden dalam berbagai situasi dan konteks (Parmudi n.d.). Wawancara dilakukan dengan salah satu founder di organisasi non-pemerintahan tersebut.

Selanjutnya, observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik, bila dibandingkan dengan yang lain. Tak terbatas oleh manusia saja, tetapi terhadap objek-objek alam yang lainnya. Pengamatan dalam riset ini adalah dengan mengamati akun media sosial demokrasikita.id melalui Instagram.

Dokumentasi merupakan cara yang dipakai untuk mendapatkan data dan informasi yang berbentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung riset. Studi dokumen adalah pelengkap dari observasi dan wawancara agar dapat dipercaya atau memiliki kredibilitas tinggi bila didukung oleh foto-foto dan karya tulis akademik yang sudah ada. Dalam riset ini, data dikumpulkan dengan cara membaca dan mempelajari dokumen-dokumen yang terkait topik permasalahan, yaitu literatur tentang peran civil society dalam membangun demokrasi lokal, terutama di Kota Bandung.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasikita.Id Sebagai Bagian Dari Civil Society

Kota Bandung dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat partisipasi masyarakat sipil yang cukup tinggi, ditandai dengan banyaknya organisasi masyarakat sipil (*civil society organization/CSO*) yang aktif di berbagai sektor sosial, politik, dan lingkungan. Berdasarkan data yang diakses dari website open data Kota Bandung pada rentang waktu tahun 2017 hingga 2021, tercatat terdapat lebih dari 300 organisasi masyarakat sipil, yang terdiri dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), komunitas warga, organisasi kepemudaan, serta gerakan sosial berbasis lingkungan dan pendidikan politik warga (Portal Satu Data Kota Bandung 2023). Banyaknya CSO ini menunjukkan bahwa warga Bandung memiliki

kesadaran tinggi terhadap pentingnya ruang partisipatif dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan demokrasi lokal.

Dalam konteks inilah, demokrasikita.id hadir sebagai salah satu inisiatif masyarakat sipil yang berfokus pada penguatan kualitas demokrasi lokal, khususnya menjelang momentum Pilkada Kota Bandung. Inisiatif ini diinisiasi oleh beberapa aktor masyarakat sipil, seperti The Room 90, KNOD Playground (*laboratorium design thinking*), Gapatma yang berfokus pada isu demokrasi dan ekonomi politik, serta Bandung Bergerak sebagai media partisipatif warga. Demokrasikita.id dibentuk bukan untuk terlibat langsung dalam kontestasi politik, melainkan untuk menjadi ruang kontrol sosial dan refleksi terhadap proses pemilu yang sering kali minim partisipasi dan esensi demokratis. Tujuannya jelas yaitu untuk menaikkan kualitas demokrasi lokal dengan memperkuat suara warga dan memperluas partisipasi politik yang sehat (Nurohman 2018).

Kemunculan demokrasikita.id juga menjadi bentuk kritik terhadap kecenderungan partisipan dalam proses politik lokal, di mana agenda politik sering kali didominasi oleh elit partai dan kepentingan tertentu. Dalam situasi tersebut, demokrasikita.id berperan sebagai penyeimbang dan penjaga independensi ruang publik, dengan menghadirkan koalisi non-partisan komunitas dan masyarakat sipil untuk masa depan Bandung yang lebih demokratis. Melalui kampanye seperti #berpolitiklebihaktif dan #5aspirasiwargibandung, gerakan ini menegaskan posisi masyarakat sipil bukan sekadar sebagai penonton pemilu, melainkan sebagai aktor penting dalam mengawal transparansi, aspirasi warga, dan akuntabilitas pemerintahan kota. Dengan demikian, demokrasikita.id menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat sipil di Bandung tidak hanya berperan sebagai penggerak sosial, tetapi juga sebagai penjaga substansi demokrasi di tingkat lokal.

Peran demokrasikita.id sebagai *Civil Society* dalam Penguatan Demokrasi Lokal

Peran demokrasikita.id dalam penguatan demokrasi lokal sebagai *civil society* mencakup dua aspek yaitu advokasi dan kontrol sosial. Kedua aspek ini saling berkaitan dan menjadi landasan penting bagi keterlibatan masyarakat dalam mempengaruhi arah kebijakan serta menjaga proses demokrasi berlajang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, peran pemberdayaan tidak menjadi fokus dalam dalam demokrasikita.id namun tetap hadir untuk melengkapi.

Peran Advokasi

Demokrasikita.id hadir sebagai bagian dari *civil society* yang memainkan peran penting dalam menguatkan demokrasi lokal di Kota Bandung. Dalam teori *civil society*, advokasi memiliki peran dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan cara

menghimpun, mengolah, dan menyalurkan aspirasi agar dapat memengaruhi arah kebijakan publik. Peran inilah yang dijalankan oleh demokrasikita.id, yakni menjadikan aspirasi masyarakat sebagai dasar penyusunan agenda politik dan kebijakan pemerintah daerah. Peran advokasi ini tidak dijalankan secara abstrak, melainkan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur dan sistematis sehingga aspirasi masyarakat terolah menjadi rekomendasi konkret.

Demokrasikita.id menempatkan diri sebagai perantara yang menjembatani suara masyarakat dengan pemerintah, sekaligus memastikan bahwa kepentingan publik benar-benar menjadi dasar dalam proses penyusunan kebijakan. Hal ini sejalan dengan informasi yang diberikan oleh Allyah selaku *founder* dari demokrasikita.id

“Memastikan apa yang dijalankan pilkada itu berdasarkan aspirasi orang Bandung langsung lewat Rebut Pilkada Bandung, memetakan apa masalah dan penyelesaian di kota bandung. DemokrasiKita jadi kendaraan buat semua civil society di Kota Bandung yang punya isu sama untuk dikawal bersama”

Rebut Pilkada Bandung menjadi agenda koalisi komunitas non-partisan hadir dan melahirkan dokumen Aspirasi Wargi Bandung 2029. Gagasan ini lahir sebagai sebuah eksperimen membangun sekaligus mengasah kekuatan kolektif melalui proses yang kolaboratif dan partisipatif. Melalui kerja sama tersebut, masyarakat dilibatkan mulai dari pemetaan, menguraikan, dan memikirkan persoalan kota hingga mengartikulasikan berbagai kemungkinan solusi. Dengan begitu, akan muncul kekompakan antar masyarakat yang menjadi pondasi penting untuk memperjuangkan kepentingan bersama di Kota Bandung.

Dalam rangka mewujudkan perannya sebagai *civil society*, demokrasikita.id menyusun mekanisme kerja yang jelas dan bertahap agar setiap proses partisipasi masyarakat dapat berjalan dengan arah yang terukur. Secara garis besar, tahapan yang ditempuh terdiri dari tiga fase utama yaitu, agenda yang dimulai pada bulan Agustus dengan pemetaan isu atau permasalahan yang terjadi di Kota Bandung. Kemudian, pada bulan September-Oktober melakukan pengumpulan data untuk menajamkan aspirasi melalui riset kuantitatif. Tahap terakhir, berlangsung pada bulan Oktober hingga November, yaitu diseminasi hasil aspirasi sekaligus penyelenggaraan rangkaian diskusi tematik dengan para pakar untuk membahas berbagai potensi solusi. Tahapan ini menjadi kerangka kerja demokrasikita.id dalam memastikan bahwa suara masyarakat tidak berhenti sebagai keluhan, melainkan bergerak menuju gagasan solusi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan (Hadi n.d.).

Kerangka kerja ini tidak berhenti pada tataran konsep, langkah pertama diwujudkan melalui forum diskusi terarah bernama “Ngariung Bersama”, yang berfokus pada pemetaan masalah.

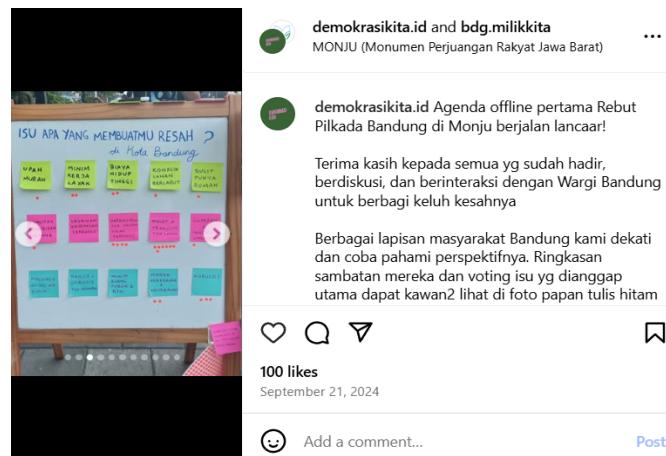


Gambar 1. Ngariung Bersama menjadi Momen Awal Pergerakan.

Sumber: Instagram @demokrasikita.id

Aspirasi dihimpun melalui berbagai komunitas dan individu yang selama ini bergerak dalam lintas isu, seperti lingkungan hidup, hunian, pergerakan pemuda, buruh, agraria, transportasi, pendidikan atau literasi, sampah, disabilitas, media, perempuan, HAM atau gerakan sipil, ekonomi, pekerja digital, inovasi dan kreatif, keberagaman dan toleransi beragama, sejarah, dan arsitektur. Proses panjang ini menghasilkan lima tema besar yang merepresentasikan keresahan utama masyarakat Kota Bandung, yakni hak sipil, kesejahteraan ekonomi, lingkungan, sistem mobilisasi masyarakat, dan tata kelola kota dengan pembobotan pada isu-isu yang dirasa mendesak, seperti akses pendidikan, upah layak, pengelolaan sampah, transportasi publik, dan hunian.

Tahap berikutnya adalah penyebaran survey aspirasi masyarakat Kota Bandung yang bertujuan untuk memperkuat dan memperkaya 15 kelompok isu hasil pemetaan NgaRiung Bandung dengan data kuantitatif. Survey ini dilaksanakan melalui dua cara yaitu secara online dan offline dengan tujuan menjangkau berbagai kalangan masyarakat.



Gambar 2. Survey Aspirasi Masyarakat Kota Bandung Secara Offline.

Sumber: Instagram @demokrasikita.id



Gambar 3. Survey Aspirasi Masyarakat Kota Bandung Secara Online.

Sumber: Instagram @demokrasikita.id

Sebanyak 418 warga yang memiliki keterikatan dengan Kota Bandung, baik ber-KTP, tinggal, maupun bekerja di kota ini ikut berpartisipasi. Mereka turut menyumbangkan aspirasi melalui berbagai ruang interaksi publik, mulai dari Monumen Perjuangan (Monju), Saparua, hingga Braga. Melalui proses ini, dihasilkan pemetaan yang lebih detail terhadap 15 kelompok isu permasalahan, yang kemudian disaring kembali menjadi 5 (lima) isu prioritas menurut masyarakat Kota Bandung beserta dinamika yang mereka rasakan di dalamnya.

Agenda selanjutnya diwujudkan dalam “Rancang Bandung 2025”, merupakan sebuah forum yang mempertemukan 15 (lima belas) pakar, 50 (lima puluh) undangan, dan 50 (lima puluh) warga Bandung yang dipilih secara acak. Forum ini dirancang untuk merumuskan solusi bersama atas 5 (lima) isu prioritas yang telah dipetakan. Aspirasi masyarakat disusun ke dalam format Tantangan Utama - Misi - Solusi, sebuah pendekatan yang terinspirasi dari

konsep *Mission* yang digagas oleh Prof. Mariana Mazzucato dari *Institute for Innovation & Public Purpose* University College London.



Gambar 4. Booklet Aspirasi Wargi Bandung 2029.

Sumber: Instagram @demokrasikita.id

Berdasarkan serangkaian forum tersebut, hadirlah booklet yang berisi 5 (lima) misi utama dari isu prioritas yang telah ditentukan, sebagai berikut:

1. Isu Prioritas 1, Macet dan Kebutuhan akan Transportasi Publik. Dirumuskan dengan misi masyarakat Bandung dapat bermobilisasi dengan efektif, efisien, aman, nyaman, dan berkeselamatan, melalui layanan transportasi publik yang berkeadilan di tahun 2029.
2. Isu Prioritas 2, Infrastruktur Mobilitas yang Terbengkalai dan Tidak Layak. Menghasilkan misi masyarakat Bandung memiliki sistem pengambilan keputusan yang partisipatif, berkelanjutan, dan akuntabel untuk infrastruktur mobilitas yang aman, nyaman, dan inklusif di tahun 2029.
3. Isu Prioritas 3, Pengelolaan Sampah yang Tidak Terintegrasi dan Minim Penegakan Aturan. Misinya adalah masyarakat Bandung memiliki regulasi dan ekosistem pengelolaan (pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan) sampah yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan di tahun 2029.
4. Isu Prioritas 4, Maraknya Korupsi & Tata Kelola yang Buruk. Isu tersebut dituangkan melalui misi masyarakat Bandung memiliki pemerintah yang transparan, akuntabel, dan proaktif dalam edukasi anggaran serta melayani publik dengan efisien dan berintegrasi di tahun 2029.
5. Isu Prioritas 5, Upah Murah, Kerja Tidak Layak, dan Tingginya Biaya Hidup. Memiliki misi yang menekankan masyarakat Bandung mendapatkan kesempatan kerja layak dan berkeadilan, serta akses ke kebutuhan hidup pokok di tahun 2029

Melalui lima isu prioritas dan misi utama tersebut, Rancangan Bandung 2029 melahirkan sebanyak 29 solusi yang ditawarkan sebagai langkah nyata menuju terwujudnya visi bersama. Solusi-solusi ini tidak hanya berangkat dari keluhan, melainkan hasil dialog antar warga, pakar, dan pemangku kepentingan lain, sehingga diharapkan dapat menjadi pijakan konkret bagi perumusan kebijakan publik di Kota Bandung.

Masalah dan solusi sudah tersedia, maka langkah terakhir adalah memastikan calon pemimpin Kota Bandung benar-benar memahami dan memiliki komitmen terhadap isu-isu tersebut. Demokrasikita.id bersama dengan *Non-Governmental Organization* (NGO) lainnya menyelenggarakan Uji Publik Calon Wali Kota Bandung di luar mekanisme uji publik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). melalui uji publik versi masyarakat ini, masyarakat Kota Bandung dapat melihat apakah calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung hanya sekedar menyampaikan visi misi, atau memiliki strategi yang sejalan dengan masalah dan solusi yang telah dipetakan. Forum ini berfungsi sebagai ruang kritis agar masyarakat dapat menilai kesiapan calon pemimpin, memahami keresahan masyarakat, mengakui 29 solusi yang ditawarkan dan mampu merumuskan kebijakan konkret yang sejalan dengan aspirasi publik (Firmansyah 2022).

Dapat disimpulkan bahwa posisi demokrasikita.id merupakan perantara antara masyarakat dan pemerintah yang berhasil menjalankan peran advokasi *civil society* secara nyata dalam konteks demokrasi lokal di Kota Bandung. Melalui serangkaian tahapan yang sistematis, mulai dari pemetaan isu, penelitian, hingga forum partisipatif, demokrasikita.id mampu mengubah aspirasi masyarakat menjadi rekomendasi kebijakan yang terukur.

Peran Kontrol Sosial

Lima aspirasi prioritas yang telah dirumuskan melalui proses partisipatif bukan hanya sekedar bentuk advokasi, namun juga menjadi titik pijak bagi peran kontrol sosial demokrasikita.id. Aspirasi tersebut memiliki dua fungsi, yaitu mendorong pemerintah agar mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam kebijakan publik, dan di sisi lain menjadi pengingat sekaligus tuntutan bahwa persoalan-persoalan mendesak masyarakat Kota Bandung masih menanti penyelesaian nyata.

Peran kontrol sosial dalam *civil society* pada hakikatnya adalah memastikan jalannya pemerintahan tetap sejalan dengan aspirasi masyarakat melalui mekanisme pengawasan, kritik, dan penagihan akuntabilitas. demokrasikita.id memainkan peran ini dengan tidak hanya menghimpun aspirasi masyarakat, namun juga mengawal agar hasil pemetaan isu tidak berhenti menjadi sebuah wacana. Tahun lalu, Rebut Pilkada Bandung hanya berupa kegiatan kolaborasi bersama *Non-Governmental Organization* (NGO) lainnya dan

memanfaatkan momentum Pilkada Kota Bandung. Namun, langkah selanjutnya yaitu tahun ini demokrasikita.id berkomitmen untuk bergerak secara berkelanjutan tiap tahunnya dengan mendorong agar aspirasi yang sudah dipetakan benar-benar terwujud melalui kebijakan (Fakih 1996).

Berdasarkan kerangka kontrol sosial, demokrasikita.id dipahami sebagai kendaraan politik masyarakat yang menghimpun suara, kajian, dan kekuatan kolektif dari berbagai isu untuk dibawa ke hadapan pemerintah. Tujuannya jelas, yakni membangun satu front bersama agar isu-isu prioritas warga dapat diperjuangkan secara lebih terorganisir. Kontrol sosial yang dilakukan mencakup pengawalan terhadap aspirasi-aspirasi masyarakat agar benar-benar dijalankan oleh pemerintahan yang sedang berkuasa. Aspirasi yang telah dipetakan tidak berhenti pada tahap perancangan saja, namun harus ada realisasi anggaran, implementasi program, hingga lahirnya kebijakan konkret dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) ataupun Peraturan Walikota (Perwalkot).

Lima aspirasi prioritas hasil proses partisipatif masyarakat Kota Bandung menjadi bukti nyata bahwa demokrasikita.id menjalankan perannya sebagai bagian dari *civil society*. Aspirasi tersebut bukan hanya instrumen advokasi untuk mendorong pemerintah mengakomodasi kebutuhan masyarakat, lebih dari itu, aspirasi menjadi alat kontrol sosial yang memastikan jalannya pemerintahan sejalan dengan kepentingan publik. Melalui hal tersebut, demokrasikita.id berfungsi untuk mengawal agar suara kepentingan masyarakat tidak berhenti di tataran wacana, melainkan bergerak menuju kebijakan nyata yang dapat dirasakan manfaatnya.

Peran Pemberdayaan

Peran pemberdayaan dalam demokrasikita.id sebenarnya bukan menjadi fokus utama sebagaimana peran advokasi dan kontrol sosial dilaksanakan. Namun, praktik pemberdayaan tetap hadir dalam DemokrasiKita.id melalui kerja sama dengan berbagai *Non-Governmental Organization* (NGO).



Gambar 5. Agenda KelasLiar BandungBergerak bersama demokrasikita.id.

Sumber: Instagram @demokrasikita.id

Salah satunya adalah kegiatan Kelas Liar yang diinisiasi BandungBergerak, yaitu *Non-Governmental Organization* (NGO) yang menyediakan sebuah ruang diskusi dan pertemuan untuk membahas isu-isu Kota Bandung. Forum ini dihadiri oleh masyarakat dari berbagai kalangan untuk menyalurkan aspirasi, meningkatkan kapasitas kritis, memperluas wawasan, dan memperkuat jaringan lintas komunitas.

Meskipun peran pemberdayaan tidak menjadi agenda pokok, peran ini menjadi penopang bagi demokrasikita.id untuk memperkaya gerakan advokasi dan kontrol sosial. Kehadiran ruang-ruang kolaboratif semacam Kelas Liar membantu membangun kesadaran kolektif masyarakat, sehingga mereka lebih siap untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi lokal di Kota Bandung.

Tantangan demokrasikita.id dalam Menjalankan Fungsi Civil Society

Menjadi wadah bagi gerakan masyarakat sipil membuat [demokrasikita.id](#) seringkali dihadapkan dengan permasalahan yang menjadi tantangan dalam upaya menjalankan fungsinya sebagai *civil society* di Kota Bandung. Dalam konteks demokrasi lokal di Kota Bandung, dinamika yang dihadapi sebagai CSO tidak hanya berkaitan dengan persoalan bagaimana advokasi yang dilakukan itu berjalan, tetapi juga mencakup banyaknya kepentingan yang harus diakomodir, keterbatasan dukungan struktural, serta persoalan tentang bagaimana gerakan ini akan tetap berlanjut (Danilla 2023). Untuk mengetahui lebih jauh tantangan yang dialami oleh [demokrasikita.id](#) sebagai bagian dari *civil society* terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal berkaitan langsung dengan dinamika yang terjadi di dalam demokrasikita.id. Sebagai CSO yang tumbuh dan berkembang dengan orientasi tidak pada keuntungan dan mengedepankan kepentingan publik tantangan yang dialami adalah komitmen dari para penggerak dalam menjaga stabilitas dan arah gerak organisasi. Permasalahan mengenai stabilitas internal ini menjadi masalah klasik, dalam konteks CSO hal ini seringkali berada pada posisi rawan untuk keluar dari jalur idealnya sebagai bagian dari pilar demokrasi yang memiliki fungsi mengawal kepentingan publik, menjaga nilai-nilai demokrasi, dan menjadi penekan terhadap kekuasaan negara.

Sejalan dengan pandangan (Hikam 1999) dalam *Demokrasi dan Civil Society*, idealnya masyarakat sipil berperan melakukan pengawasan terhadap negara dan menghindari kepentingan politik maupun ekonomi. Namun, perkembangan *civil society* pasca reformasi menunjukkan kecenderungan berbeda. Banyak organisasi masyarakat sipil yang tergoda untuk masuk ke ranah politik praktis maupun ekonomi transaksional akibat lemahnya kelembagaan internal dan ketergantungan terhadap dukungan elite politik. Fenomena ini, sebagaimana juga dikemukakan (Hadiwinata 2005), menggambarkan tantangan serius bagi CSO di Indonesia yang tengah berjuang menjaga kemandiriannya dalam ruang demokrasi yang semakin kompetitif.

Dalam konteks ini, hasil wawancara dengan founder demokrasikita.id memperlihatkan kesadaran yang sama terhadap tantangan tersebut. demokrasikita.id berkomitmen untuk tetap menjaga independensi dengan berpegang pada prinsip utamanya, yakni menjadi koalisi non-partisan komunitas dan masyarakat sipil untuk masa depan Kota Bandung yang berfokus pada advokasi publik dan penguatan demokrasi lokal, bukan sebagai alat politik praktis.

2. Faktor Eksternal

Berbeda dengan faktor internal yang lebih menyoroti persoalan komitmen dan konsistensi nilai di dalam organisasi, faktor eksternal berkaitan dengan tantangan yang muncul dari luar organisasi dan mempengaruhi keberlangsungan demokrasikita.id sebagai bagian dari *civil society* di Kota Bandung. Tantangan ini tidak terkait dengan kemurnian idealisme, tetapi dengan bagaimana organisasi menavigasi kondisi politik dan sosial di tingkat lokal yang belum sepenuhnya mendukung tumbuhnya ruang partisipasi publik yang deliberatif.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa minimnya ruang publik untuk berdialog menjadi salah satu hambatan utama bagi demokrasikita.id dalam menjalankan fungsinya. Kondisi ini menjadi latar belakang lahirnya berbagai inisiatif seperti pelaksanaan forum diskusi terbuka (FGD) yang diinisiasi organisasi tersebut sebagai bentuk penyediaan ruang alternatif bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya. Upaya ini pada dasarnya merupakan respons terhadap sistem demokrasi lokal yang masih terbatas dalam menyediakan wadah partisipatif bagi masyarakat.

Selain keterbatasan ruang publik, tantangan lain datang dari dinamika politik lokal. Dalam praktiknya, terdapat kecenderungan pemerintah untuk mengklaim hasil-hasil advokasi sebagai bagian dari kebijakan mereka sendiri, padahal kebijakan tersebut berangkat dari aspirasi masyarakat yang diperjuangkan oleh demokrasikita.id bersama komunitas-komunitas sipil, seperti kolaborasi dengan komunitas sopir angkot dalam mendorong kebijakan transportasi publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa relasi antara pemerintah dan *civil society* kerap kali tidak seimbang.

Meskipun demikian, demokrasikita.id tetap berusaha agar posisinya sebagai bagian dari *civil society* tetap independen. Dalam hal ini, demokrasikita.id berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat melalui penyediaan ruang diskursus dan pendidikan politik warga, bukan pada pencapaian politik praktis. Sikap ini sejalan dengan pandangan (Diamond 1999) yang menegaskan bahwa *civil society* harus tetap independen dari negara maupun pasar agar dapat menjalankan fungsi pengawasan dan menjadi kekuatan moral yang menekan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, meskipun dihadapkan pada berbagai tekanan struktural dan pengakuan yang terbatas, demokrasikita.id tetap konsisten menjalankan fungsi idealnya sebagai *civil society* yaitu menjadi kelompok penyeimbang kekuasaan, pengawal aspirasi publik, serta pelopor demokrasi partisipatif di tingkat lokal.

Selain adanya keterbatasan dalam penyediaan ruang diskusi publik dan ketimpangan relasi antara negara dan masyarakat, faktor politik juga memainkan peran besar dalam memengaruhi arah gerak demokrasikita.id di Kota Bandung. Dinamika politik lokal seringkali ditandai dengan tarik-menarik kepentingan antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat. Dalam konteks inilah demokrasikita.id berupaya menjaga posisi strategisnya dengan memetakan aktor-aktor kunci, menganalisis hubungan kekuasaan serta kepentingan yang terlibat, dan mencari titik temu di antara berbagai kepentingan tersebut. Langkah ini bukan hanya menjadi strategi adaptif terhadap tekanan politik eksternal, tetapi juga menunjukkan kemampuan

demokrasikita.id dalam memainkan peran sebagai perantara bagi masyarakat dan pemerintah (Asrida, W., Marta, A., & Hadi 2021).

Melalui strategi tersebut, demokrasikita.id berupaya memastikan bahwa fungsi utamanya sebagai bagian dari *civil society* tetap terjaga yaitu sebagai ruang penguatan kesadaran politik warga dan jembatan antara masyarakat dengan negara, bukan alat kepentingan politik tertentu. Sikap ini menegaskan bahwa kemandirian organisasi masyarakat sipil merupakan syarat utama bagi keberlanjutan demokrasi lokal yang partisipatif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dengan menganalisis bagaimana [demokrasikita.id](#) sebagai bagian dari civil society dalam penguatan demokrasi lokal di Kota Bandung maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kehadiran Civil Society Organization (CSO) seperti demokrasikita.id di Kota Bandung menunjukkan bahwa praktik demokrasi lokal tidak hanya bergantung pada institusi formal negara, tetapi juga pada inisiatif masyarakat yang berupaya menjaga nilai-nilai partisipasi, transparansi, dan kontrol terhadap kekuasaan. Demokrasikita.id menjadi representasi dari civil society yang menjalankan fungsi idealnya sebagai penghubung antara negara dan warga melalui advokasi, diskusi publik, serta produksi wacana kritis terhadap isu-isu kebijakan daerah. Kontribusi demokrasikita.id dalam penguatan demokrasi lokal tercermin dari upayanya membuka ruang deliberatif melalui forum-forum dialog publik seperti FGD yang mempertemukan masyarakat, akademisi, dan teknokrat. Aktivitas tersebut memperlihatkan bentuk nyata dari demokrasi partisipatif di tingkat lokal, sekaligus menjadi koreksi terhadap lemahnya ruang formal partisipasi warga dalam sistem politik daerah. Dengan demikian, demokrasikita.id tidak hanya memperkuat dimensi substantif demokrasi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran politik warga untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Meskipun demikian, tantangan baik secara internal maupun eksternal masih dihadapi oleh demokrasikita.id. Secara internal, persoalan komitmen dan stabilitas organisasi menjadi titik rawan yang berpotensi menggeser orientasi gerakan. Sementara secara eksternal, keterbatasan ruang publik, ketimpangan relasi antara pemerintah dan masyarakat, serta tarikan kepentingan politik turut mempengaruhi arah gerak CSO ini. Namun, dengan tetap menjaga independensi dan berfokus pada penguatan kapasitas warga, demokrasikita.id memperlihatkan bahwa civil society dapat tetap menjadi kekuatan moral dan sosial yang berperan penting dalam menyeimbangkan kekuasaan serta memperdalam kualitas demokrasi lokal di Kota Bandung.

DAFTAR REFERENSI

- Asrida, W., Marta, A., & Hadi, S. (2021). "Civil Society, Demokrasi Dan Demokratisasi." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(2):131-42. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.225>
- Danilla, D. P. (2023). "Kolaborasi Civil Society Organization (CSO) Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu Dalam Mengatasi Perkawinan Anak Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Universitas Padjadjaran*.
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Johns Hopk. University Press. <https://doi.org/10.56021/9780801860140>
- Fakih, M. (1996). *Masyarakat Sipil*. Insist Press.
- Firmansyah, I. (2022). "Peran Dan Fungsi Civil Society Organization Dalam Dinasti Politik Dan Korupsi Di Kota Banjar Pada Tahun 2018-2022." *Universitas Padjadjaran*.
- Hadi, O. H. (N.D.). "Peran Masyarakat Sipil Dalam Proses Demokratisasi." *Ui Scholars Hub*.
- Hadiwinata, B. S. (2005). "Pembangun Dan Sekaligus Perusak Demokrasi." DOI: <https://doi.org/10.22146/Jsp.11037>.
- Hikam, M. A. S. (1999). *Demokrasi Dan Civil Society*. LP3ES.
- Nurohman, T. (2018). "Peran LSM Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Peran LSM Kompleet Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Melung Kabupaten Banyumas)." *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi*.
- Paradise, M. A., & Lubis, S. (2025). "Civil Society Dalam Dinamika Reklamasi Teluk Jakarta." *Ilmu Dan Budaya*, 46(1):32-44.
- Parmudi, M. (N.D.). "Kebangkitan Civil Society Di Indonesia." *At-Taqaddum*, 7(2). <https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1208>
- Portal Satu Data Kota Bandung. (2023). "Data Organisasi Masyarakat Sipil Kota Bandung. Portal Satu Data Pemerintah Kota Bandung." Retrieved (<https://data.bandung.go.id>).
- Sihite, G. M., Malik, I., Ky, I. G. S., & Widodo, P. (2023). "Peran Organisasi Masyarakat Sipil/Civil Society Organization (CSO) Dalam Menyelesaikan Konflik Agraria Di Indonesia." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(11):5232-44.
- Usman, S. (2002). "'Civil Society' Di Indonesia: Suatu Tantangan." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(3):379-91.
- Yanti, S. (2025). "Peran Civil Society Dalam Demokrasi Indonesia." *Jendela Hukum Fakultas Hukum Universitas Wiraraja*, 12(1). <https://doi.org/10.24929/jjh.v12i1.4221>